

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta member gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuaiTupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas social masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2026.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2026 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun2026 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2026;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2024.
17. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
18. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Adapun yang menjadi Tujuan dari penyusunan Renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi umum pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025;
2. Mengetahui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026.

D. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

Sistematis penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi mengajukan usulan program sebanyak 7 (Tujuh) program dan kegiatan sebanyak 15 (Lima belas) serta 28 (Dua puluh delapan) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi . SumberDaya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - 2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3). Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b. Pemberdayaan Perempuan, Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - 1). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
- c. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**
 - 1). Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.

- 2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. Program Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kab/Kota
 - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi.
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 1). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

4. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 2). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - 2). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.
 - 2). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

- 3). Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Program Pengendalian Penduduk

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerinta Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

- 1). Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA – MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada OrmasPengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2024, capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai **97.34 %** .

Program dan kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun 2024 mencakup 12 (Dua Belas) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub kegiatan, dapat dilihat melalui table berikut:

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN APBDP PROVINSI JAMBI
POSISI BULAN DESEMBER 2024

KEPALA OPD : Drs. R. NAJMI

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	APBD MURNI	PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			SISA ANGGARAN Rp.
			Rp.	Rp.	Rp.	KEUANGAN		FISIK(%)	
						Rp.	%	REAL	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	125.943.410,00	83,96	83,96	24.056.590,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trianingsih, M.E	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	125.943.410,00	83,96	83,96	24.056.590,00
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.223.617.203,00	104.885.958,00	10.328.503.161,00	9.474.437.394,00	91,73	91,73	854.065.767,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Poppy Arisandi	10.223.617.203,00	104.885.958,00	10.328.503.161,00	9.474.437.394,00	91,73	91,73	854.065.767,00
3	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	3.420.000,00	11,43	11,43	26.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ulil Fahmi, S.Th.I	29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	3.420.000,00	11,43	11,43	26.500.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		305.534.216,00	0,00	305.534.216,00	250.132.303,00	81,87	63,34	55.401.913,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	5.073.140,00	0,00	5.073.140,00	5.053.664,00	99,62	100,00	19.476,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	100.001.184,00	0,00	100.001.184,00	65.034.184,00	65,03	65,03	34.967.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ulil Fahmi, S.Th.I	200.459.892,00	0,00	200.459.892,00	180.044.455,00	89,82	89,82	20.415.437,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.961.483,00	0,00	250.961.483,00	230.218.756,00	91,73	91,73	20.742.727,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ulil Fahmi, S.Th.I	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ulil Fahmi, S.Th.I	119.459.880,00	0,00	119.459.880,00	105.684.256,00	88,47	88,47	13.775.624,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	130.001.603,00	0,00	130.001.603,00	123.034.500,00	94,64	94,64	6.967.103,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		685.239.200,00	0,00	685.239.200,00	589.554.260,00	86,04	86,04	95.684.940,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ulil Fahmi, S.Th.I	270.050.000,00	0,00	270.050.000,00	224.930.125,00	83,29	83,29	45.119.875,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ulil Fahmi, S.Th.I	205.189.200,00	0,00	205.189.200,00	157.022.400,00	76,53	76,53	48.166.800,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Ulil Fahmi, S.Th.I	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	207.601.735,00	98,86	100,00	2.398.265,00
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	74.894.350,00	96,02	100,00	3.105.650,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Eka Susi Susanti, SH	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	74.894.350,00	96,02	100,00	3.105.650,00
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	325.145.900,00	92,90	92,90	24.854.100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Eka Susi Susanti, SH	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	325.145.900,00	92,90	92,90	24.854.100,00
III	Program Perlindungan Perempuan								
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	213.171.595,00	94,74	94,74	11.828.405,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Anna Solifariza, SE	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	213.171.595,00	94,74	94,74	11.828.405,00
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		69.020.000,00	0,00	69.020.000,00	63.835.600,00	92,49	92,49	5.184.400,00
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Eka Susi Susanti, SH	69.020.000,00	0,00	69.020.000,00	63.835.600,00	92,49	92,49	5.184.400,00
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	74.262.800,00	99,02	100,00	737.200,00
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rina Afriana, S. IP	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	74.262.800,00	99,02	100,00	737.200,00
V	Program Perlindungan Khusus Anak								

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		101.500.000,00	0,00	101.500.000,00	101.005.000,00	99,51	100,00	495.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi (DAK)	Rina Afriana, S. IP	101.500.000,00	0,00	101.500.000,00	101.005.000,00	99,51	100,00	495.000,00
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		235.480.000,00	0,00	235.480.000,00	225.366.400,00	95,71	95,71	10.113.600,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Anna Solifariza, SE	235.480.000,00	0,00	235.480.000,00	225.366.400,00	95,71	95,71	10.113.600,00
VI	<i>Program Administrasi Pemerintah Desa</i>								
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	189.805.380,00	75,92	75,92	60.194.620,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Riska Yolanda, SH	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	189.805.380,00	75,92	75,92	60.194.620,00
VII	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>								
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.494.470.678,00	99,63	100,00	5.529.322,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bayu Eka Putra, S.E	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	99.456.237,00	99,46	100,00	543.763,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Riska Yolanda, SH	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.395.014.441,00	99,64	100,00	4.985.559,00
VIII	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>								
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk		400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	386.731.500,00	96,68	100,00	13.268.500,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dian Noviana Rusti, SKM, MPH	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	386.731.500,00	96,68	100,00	13.268.500,00
IX	<i>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>								

1	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	73.842.000,00	98,46	100,00	1.158.000,00
	Peningkatan Kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program Katahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dian Noviana Rusti, SKM, MPH	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	73.842.000,00	98,46	100,00	1.158.000,00
	Jumlah		15.004.272.102,00	104.885.958,00	15.109.158.060,00	13.896.237.326,00	91,97	92,15	1.212.920.734,00

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Anak;
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja melalui indikator:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

No .	Indikator	SPM/ Standar t Nasiona l	IKK	Target RenstraPerangkat Daerah (%)				Raealisas i Capaian	Proyeksi (%)				Catat an Anali sis
				2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	-		91,5	91,5	91,5	91,5	90,30%	100%	100%	100%		
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	-		0,85	0,85	0,85	0,85	96,41%	100%	100%	100%		
4	Persentase Pengelolaan Data Gender	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Persentase Kab/Kota Layak Anak	-		9 Kab/ kota	9 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	95,53%	100%	100%	100%		
6	Indeks Perlindungan Anak	-		67	67,62	69,87	70	91,68%	100%	100%	100%		
7	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	-		50%	60%	70%	80%	70%	100%	100%	100%		
8	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	-		30	40	50	50	30%	100%	100%	100%		
	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	-		90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Mandiri	-		134	141	148	155	96,90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Berkembang	-		807	767	731	694	99,76%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Tertinggal	-		84	80	76	72	98,43%	100%	100%	100%		
	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	-		100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%		

	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	-		90%	90%	90%	90%	97,68%	100%	100%	100%	
	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Desa	-		100%	100%	100%	100%	99,02%	100%	100%	100%	
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-		1,70%	1,68%	1,65%	1,62%	99,46%	100%	100%	100%	
	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	-		65,44%	65,48%	65,50%	65,52%	97,35%	100%	100%	100%	
	Indeks pembangunan Keluarga	-		60,32	60,35	60,39	60,45	98,46%	100%	100%	100%	
	Nilai Evaluasi Sakip	-		B	B	B	B	95,36%	100%	100%	100%	
	IKM	-		Baik	Baik	Baik	Baik	81,40%	100%	100%	100%	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
2. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ditunjukan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan;
3. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal;
6. Masih kurangnya pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
7. Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik;
8. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM;
9. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
10. Masihnya rendahnya sosialisasi tentang KB dan WUS;
11. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB;
12. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
13. Masih banyaknya pernikahan dibawah usia 20 tahun dikarenakan kebutuhan sosial;
14. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan menbandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. Sehingga dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya diusulkan rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang baik dari pusat, provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2024 ditetapkan lebih mengarah kepada :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
2. Peningkatan Penanganan terhadap Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan ber-KB;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat.

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang meliputi identitas prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR	Target	Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	12 Bulan	Rp150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	12 Bulan	Rp90.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp11.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp10.323.602.833
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai fungsi dan tugas	100 Orang	Rp30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai fungsi dan tugas	100 Orang	Rp5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun berkenaan	3 Jenis	Rp50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun berkenaan	3 Jenis	Rp18.964.965
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Jenis	Rp100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Jenis	Rp44.139.184
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	Rp18.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	Rp3.004.072
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	3 Jenis	Rp350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	3 Jenis	Rp271.155.130
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	800 Lembar	Rp5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	800 Lembar	Rp2.167.005
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	800 Lembar	Rp190.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	800 Lembar	Rp137.472.880
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	800 Lembar	Rp250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AP2 Provinsi Jambi	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	800 Lembar	Rp153.108.240
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	100%	Rp311.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	100%	Rp294.220.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	100%	Rp221.359.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	100%	Rp221.359.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100%	Rp270.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AP2 Provinsi Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100%	Rp136.000.000

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	11 Kab/Kota	Rp150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	11 Kab/Kota	Rp80.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Rp350.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Rp350.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	100%	Rp250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	100%	Rp206.068.295
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Rp69.020.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Rp69.020.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	100%	Rp150.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	100%	Rp80.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100%	Rp101.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100%	Rp101.500.000

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	Rp230.140.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	Rp230.140.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	100%	Rp150.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	100%	Rp75.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kab/Kota	Rp250.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kab/Kota	Rp205.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi				
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yg difasilitasi	100%	Rp1.400.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yg difasilitasi	100%	Rp1.400.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas				
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi yang disusun dan dimanfaatkan	11 Kab/Kota	Rp500.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi yang disusun dan dimanfaatkan	11 Kab/Kota	Rp150.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kuantitas					Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kuantitas				
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Rp150.000.000	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Rp50.000.000
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana yang diperkuat		Rp200.000.000	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana yang diperkuat		Rp200.000.000
	TOTAL			16.896.019.200		TOTAL			14.896.921.804

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten dan tingkat Provinsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dikaitkan dengan kebijakan Nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Nasional (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.

Pencapaian tersebut ditandai dengan dilakukannya beberapa program prioritas Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Pembentukan UPTD PPA Provinsi Jambi dan penyediaan rumah aman dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pembentukan kampung KB;
3. Pembentukan Desa mandiri.

B. Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2022-2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan mengacu pada kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2022, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Anak dalam Pemenuhan, Penghormatan dan perlindungan Anak;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
4. Meningkatkan pemberdayaan, Pelayanan Sosial Dasar dan penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi ekonomi lokal;
5. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026, yaitu :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
		Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk
		Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri
3.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)
4	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

C. Program Dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada Permendagri No.50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi akan melaksanakan program /kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Program, 32 (tiga puluh dua) Kegiatan dan 154 (Seratus lima puluh empat) Sub Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)

- a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan provinsi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
 - Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 - Komunikasi, Informasi, Edukasi kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak

Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah
 - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi
- b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi
- b. Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah
 - Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

- c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

8. PROGRAM PENTAAAN DESA

- a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Kepala Desa dan DesaAdat
 - Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan DesaAdat yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
 - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

9. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- a. Fasilitasi Kerjasama AntarDesa yang menjadikewenanganProvinsi
 - FasilitasiKerja Sama antarDesa Lintas Kabupaten/Kota
 - FasilitasiKerja Sama DesadenganPihakKetigasi
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDesa
 - FasilitasiPenyusunanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
 - PembinaanManagemenPemerintahanDesa
 - Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi pelaksanaan Evaluasi PerkembanganDesasertaLombaDesa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - Pembinaan Aparatur PemerintahDesa
 - Pembinaan peningkatan kapasitas Anggota BPD
 - Pembinaan percepatan pembangunan melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
 - PelaksanaanPenugasanUrusan/KewenanganProvinsi yang dilaksanakan oleh Desa
 - Pembinaan dan pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalamPembiayaanDesa

- Pembinaan dan pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitas pembinaan laporan kepala desa
- Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
- Fasilitas peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
- Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa
- Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas, penataan, pemberdayaan dan pendagayunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

12. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 - Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
 - Advokasi dan sosialisasi GDPK
 - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
 - Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA

sesuai Kearifan Lokal

- Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
 - advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Advokasi dan sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Advokasi dan sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
 - Koordinasi, penyediaan, dan pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
 - Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
 - Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

13. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- a. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
 - Pengembangan dan penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
 - Penguatan Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
 - Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengembangan strategi operasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 - Peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 - Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam Program KKBPK

14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
 - Pembinaan pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
 - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
 - Peningkatan kapasitas Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
 - Pengembangan dan perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
 - Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
 - Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - Penyediaan dan pengembangan Materi IPK
 - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
 - Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
 - Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Penguatan pemberdayaan ekonomi Keluarga
 - Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
 - Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB

Tabel 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluar an Sub	Hasil Keg			Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												14.072.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												135.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	12 Bulan	12 Bulan		PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	30.000.000
		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	jumlah Dokumen RKASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokum en	12 Bulan		PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	10.000.000

		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan		PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	10.000.000
		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan		PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	15.000.000
		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	Jumlah Perubahan DPASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan		PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	-

		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	4 Dokumen	12 Bulan	Rp90.000.000	PAD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	70 persen A Indeks 100	150.000.000
		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan									persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												11,040,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Adminiastasi Keuangan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	14 bulan	100%	Rp10.323.602.833	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	11.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pelaksanaan administrasi Keuangan SKPD	Adminiastasi Keuangan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	30.000.000

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Adminiastasi Keuangan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Adminiastasi Keuangan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	5.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												30.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah secara rutin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	20.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah secara rutin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	12 Bulan		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												465.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100 Orang	100 Orang		PAD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang	100 Orang	65.000.000

		Kelengkapannya yang disediakan	Kelengkapannya yang disediakan	disediakan							disediaka		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai fungsi dan tugas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang	Rp5.000.000	PAD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan yang diikuti	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	200.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi perundang- undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang		PAD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												481.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun berkenaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	60 jenis	3 Jenis	Rp18.964.965	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	18.000.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 paket	3 Jenis	Rp44.139.184	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	50.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peserta rapat/tamu lainnya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	500 orang	3 Jenis		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	14.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	90 jenis	3 Jenis	Rp3.004.072	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	35.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 jENIS	3 Jenis		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	14.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bULAN	3 Jenis		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	25.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bULAN	3 Jenis	Rp271.155.130	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	300.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	3 Jenis		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	25.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												850.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%		PAD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%		PAD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	600.000.000

	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%		PAD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%		PAD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	150.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%		PAD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												454.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	800 Lembar	800 Lembar	Rp2.167.005	PAD	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	800 Lembar	Rp137.472.880	PAD	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	120.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	800 Lembar		PAD	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	800 Lembar	Rp153.108.240	PAD	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	180.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												617.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	Rp294.220.000	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	270.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Unit	100%	Rp221.359.200	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	197.000.000
	Pemeliharaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%		PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	Rp136.000.000	PAD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada	100%	100.000.000

		tahun berkenaan		terpelihara							tahun berkenaan		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												6.000.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Kabupaten/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	500.000.000
		Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan				100%				PAD	Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan		500.000.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	Rp80.000.000	PAD	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	500.000.000
		Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan				100%					Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan		500.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan terhadap kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	N N	500.000.000
		Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD)				100%					Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan	67,68 Indeks	500.000.000

		yang harus ditingkatkan											
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	N N	500.000.000
		Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan				100%					Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harus ditingkatkan	67,68 Indeks	500.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi												

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550 Orang			PAD			500.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550 Orang			PAD			500.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi												
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		Rp350.000.000	PAD			500.000.000

			Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan										
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang dikembangkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			500.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												1.125.000.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali			PAD			100.000.000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali			PAD			100.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia dan dilaksanakan	Terlayannya perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Layanan	100%		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang	Terlayannya perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Layanan	100%	Rp206.068.295	PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	425.000.000

			dikoordinasikan dan disinkronisasikan										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi												
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali			PAD			100.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga		Rp69.020.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			100.000.000

	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Paket			PAD			100.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diperkuat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga			PAD			100.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												1.325.000.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi												
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	1 Kali	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	300.000.000

			Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan										
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	2 Kali	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	200.000.000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikembangkan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi melalui kegiatan masyarakat	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	225.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi												

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kewenangan provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			200.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi diperkuat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga			PAD			200.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dan tersedia	Terlaksananya layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	200 KK	100%		PAD	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	200.000.000

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													600.000.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi													
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Buku	11 Kab/Kota		PAD	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	100%		300.000.000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Jumlah Data Gender dan Anak dlm Kelembagaan Data Provinsi yang tersaji dan dimanfaatkan	Tersedianya Data Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	11 Kab/Kota		PAD	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	100%		300.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													3.000.000.000
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi													
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	"Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan"	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	120 Orang	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	T1A00 %		500.000.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	T1A00 %	500.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi												
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	150 Orang	100%	Rp80.000.000	PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	500.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	500.000.000

			Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikembangkan										
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabupaten/kota yg diperkuat tentang pelaksanaan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabu/Kota	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	500.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												1.950.000.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	200.000.000

			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	perempuan						s Non Fisik			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	Rp101.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	550.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi												
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	200.000.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pendampingan tentang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	200.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah kabupaten/kota yang memerlukan pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	Rp230.140.000	PAD	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	200.000.000

			Provinsi										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan kosinkronisasikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket			PAD			200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			200.000.000

			Provinsi										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	PROGRAM PENATAAN DESA												3.950.000.000
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat												
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan inventarisasi masyarakat hukum adat	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	950.000.000
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi tentang Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	1.000.000.000

	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang diadakan	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Paket	100%		PAD	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	1.000.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												150.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi												
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	jumlah Prasarana dan SarJumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kerjasama antar desa	Terlaksananya fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi tentang Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Terlaksananya fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kawasan Pedesaan	100%	Rp75.000.000	PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	150.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												17.700.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan												

	Pemerintahan Desa												
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	850.000.000
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dilakukan pembinaan managemennya	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	300 orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penyusunan produk hukum desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	850.000.000
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah orang yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota	Rp205.000.000	PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000

	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam percepatan pembangunan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Des	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000

	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang melaksanakan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1399 Desa	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Fasilitas Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitas Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	210 BumDes	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kepala desa yang difasilitasi dalam penyusunan laporan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	330 Kade	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Pemdes yang difasilitasi dalam Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah anggota BPD yang difasilitasi mengenai peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000

	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												9.550.000.000

	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabuapten/kota yang difasilitasi dalam identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabuapten/kota yang difasilitasi dalam identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabuapten/kota yang difasilitasi dalam identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 kader	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000

	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabn/kota yg difasilitasi dalam identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat & Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Pokja Posyandu	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan PemDesa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebanan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata DesaDigital danperhutanan Sosial)	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Pasar Desa	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Desa	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.000.000.000

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yg difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Orang	100%	Rp1.400.000.000	PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	1.550.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												5.250.000.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk												
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Kabupaten/kota yang dilakukan penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan,	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	11 Kab/Kota	1.000.000.000

			Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)										
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi yang disusun dan dimanfaatkan	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	1 Dokumen	11 Kab/Kota	Rp150.000.000	PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	11 Kab/Kota	1.250.000.000
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal yang diperkuat	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	11 PKS	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	11 Kab/Kota	1.000.000.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi												

	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,72%	1 Kegiatan	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA		1.000.000.000
	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,72%	1 Dokumen	11 Kab/Kota		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA		1.000.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												2.050.000.000
	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal		Jumlah Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 modul			PAD			150.000.000

			Lokal yang dikembangkan										
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		Rp50.000.000	PAD			500.000.000
	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang digunakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket			PAD			150.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana		Jumlah Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		Rp200.000.000	PAD			500.000.000

			Bangga Kencana yang diperkuat										
	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan			PAD			150.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			150.000.000

			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi										
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang diberdayakan dan ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			300.000.000
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK		Jumlah Kabupaten/kota yang diperkuat Program KKBPK melalui jejaring kemitraan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota			PAD			150.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												3.725.000.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												

	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui penyediaan kebijakan daerah	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	200.000.000
	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal yang dikembangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	1 Modul	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	200.000.000
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	300.000.000
	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	220 Orang	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	200.000.000

	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	220 Orang	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	200.000.000
	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan yang dikembangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	1 Modul	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT	64,64%	150.000.000

	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000
	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yang tersedia	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	1 Pedum	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT	64,64%	150.000.000
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam upaya penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT	64,64%	200.000.000

	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Materi IPK yang tersedia dan dikembabangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	1 Modul	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000
	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	220 Orang	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	200.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang dikooridnasikan evaluasi pencapaian IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Ko ta	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Ko ta	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000

	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang disiapkan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi, Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,64%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64%	150.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA N KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	250.000.000
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA N KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang diperkuat dan diberdayakan ekonominya	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	55 KK	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	150.000.000

				Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDYAA N KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah peserta Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	330 Orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATKA DAN PEMEBRDYAA KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	200.000.000

	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA N KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), (UPPKS) & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yg ditingkatkan kapasitasny	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	60 Orang	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATKA DAN PEMEBRDYAA KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	150.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	PERSENTASE PENINGKATAN DAN PEMEBRDYAA N KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasi dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	11 Kab/Kota	100%		PAD	PERSENTASE PENINGKATKA DAN PEMEBRDYAA KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	300.000.000
					TOTAL				14.896.921.804				70.447.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jambi isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026 diharapkan mampu di aplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi , diikuti dengan upaya-upaya pemecahan yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Semoga RencanaKerja (Renja) DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun2026.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS,


Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP 19660403 198512 1001